

# **Analisis Bahasa untuk Kajian Sosial:** Pemaknaan kritis terhadap praktek berwacana sebagai praktek sosial

**Iwa Lukmana**

*Universitas Pendidikan Indonesia*

## ***Abstrak***

Struktur maupun dinamika sosial banyak terekam dalam data kebahasaan. Pada sisi lain, rekayasa kebahasaan dapat menjadi agen perubahan sosial itu sendiri. Sayangnya data kebahasaan, juga teknik analisis terkait yang dikembangkan oleh para bahasawan, sepertinya masih belum banyak dilirik oleh para analis sosial. Tulisan ini mencoba menunjukkan bahwa analisis bahasa, dalam hal ini analisis wacana, dapat digunakan dalam kajian sosial, bahkan sampai tahapan yang detil, yang tentu akan sangat berguna ketika dikolaborasikan dengan strategi analisis lainnya. Hal ini ditunjukkan lewat data dari sejumlah penelitian, dengan fokus pada aspek hirarki, keberpihakan, dan pembentukan identitas. Tulisan ini juga membahas implikasi dari kajian ini bagi berbagai bidang, terutama kewarganegaraan dan pendidikan.

**Kata kunci:** *analisis wacana, analisis sosial, tataahasa sistemik-fungsional, pemaknaan kritis, hirarki, keberpihakan, identitas*

## ***Abstrak versi Inggris:***

Social structure and dynamics are to a large extent evidenced in linguistic data. Moreover, linguistic technologisation can serve as an agent of social change. Unfortunately, linguistic data and the accompanying analytical methods developed by linguists appear to be largely ignored by social analysts. This article attempts to demonstrate that linguistic analysis, more specifically discourse analysis, can be used as one of the methods of social investigation. This contribution is illustrated through several research studies dealing with hierarchy, bias, and identity. This article also discusses some implications of critical analysis of texts, especially for citizenship and education.

**Key words:** *discourse analysis, social analysis, systemic-functional grammar, critical reconstruction of meaning, hierarchy, bias, identity*

## 1 Pendahuluan

Bagaimana sebuah proses sosial berlangsung tentu terekam dalam berbagai elemen komunikasi, baik yang bersifat non-verbal maupun verbal, baik yang cenderung statis maupun dinamis. Sebuah mahkota atau bangunan keraton, misalnya, dapat merupakan saksi bisu dari adanya kekuasaan yang cenderung bersifat feodal. Sementara itu, sebuah peristiwa perang dapat ditafsirkan sebagai indikasi dari adanya proses sosial yang kehilangan harmoni. Demikian pula dengan data verbal. Sebagai salah satu elemen komunikasi, bahasa merupakan alat rekam yang baik dari berbagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan kita. Lebih dari itu, bahasa juga sering dijadikan alat pendobrak untuk mengubah praktek-praktek sosial tertentu. Dengan demikian, data terkait penggunaan bahasa dapat ditafsirkan secara pasif, yakni sebagai alat perekam, maupun dinamis, yaitu sebagai alat pengubah tatanan sosial.

Permasalahannya, bagaimana kita dapat memaksimalkan penggunaan data bahasa untuk berbagai kajian. Dalam kaitan ini, jangankan masyarakat awam, para ilmuwan yang sering terlibat dalam kajian-kajian sosial pun ditenggarai sering tidak memperhatikan data bahasa (Fairclough 1995, 2003). Bisa jadi mereka melirik data bahasa untuk mendapatkan kesan umum tentang praktek sosial yang terkandungnya; namun tanpa analisis yang mendalam, kesan tersebut dapat saja salah, atau minimal kurang akurat.

Tulisan ini bermaksud mengangkat perlunya analisis bahasa sebagai satu alternatif strategi kajian sosial. Dari segi kandungan informasinya, bahasa mungkin mirip dengan lautan, yang begitu kaya dengan berbagai hal namun perlu diselami demi mendapatkan manfaatnya secara luas. Kajian kebahasaan sendiri telah cukup jauh berproses, tidak lagi sekedar berupa kajian struktural-formal namun telah melangkah hingga ke strategi pemaknaan yang bersifat kritis. Ini semua akan diilustrasikan lewat ulasan singkat terhadap aspek hirarki, keberpihakan, dan identitas.

## 2 Bahasa sebagai cermin, bahasa dalam proses

Dalam keterkaitannya dengan proses sosial, bahasa dapat berperan secara statis maupun dinamis, pasif maupun aktif. Peran bahasa yang berdimensi ganda ini disebabkan oleh karakter bahasa sendiri, yang memiliki sifat dialektik (lihat Fairclough 1995). Karena karakternya inilah bahasa menjadi menarik untuk dikaji dan menjadi penting untuk dieksplorasi untuk membantu mendapatkan pemaknaan yang akurat terhadap berbagai struktur dan dinamika sosial.

Dalam peran pasifnya, bahasa merupakan alat rekam atau cermin yang baik dari apa yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Mencermati cermin ini tentu dapat dilakukan pada berbagai tingkatan. Pada tingkatan yang paling luar atau paling sederhana adalah analisis terhadap pemilihan kata, seperti yang sudah banyak dilakukan pada berbagai bidang kajian. Pada tingkatan yang lebih dalam, dapat dieksplorasi hal-hal yang tidak (terlalu) kasat mata, misalnya lewat analisis terhadap struktur klausa atau struktur percakapan.

Intinya, bahasa dapat berperan sebagai refleksi dari proses sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Misalnya, teks-teks yang diproduksi pada sebuah kerajaan akan menggambarkan struktur sosial yang kaku-hirarkis. Contoh lain, bahasa yang memiliki *undak-usuk* (tingkatan-tingkatan) seperti bahasa Sunda atau Jawa merupakan cerminan dari masyarakatnya yang relatif masih berorientasi pada hirarki. Mulai ditinggalkannya bahasa Sunda oleh kaum muda dicurigai sebagai salah satu akibat dari kentalnya hirarki ini, sementara masyarakat Sunda sendiri cenderung terus

bergerak menuju arah yang berlawanan, yaitu demokrasi (lihat Rosidi 2004, 2005, 2006; Lukmana 2005, 2008).

Selain berperan secara statis, bahasa juga dapat berperan dinamis. Dalam hal ini, bahasa ikut serta menjadi elemen yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Dengan kata lain, dengan sifat multidimensinya, perubahan sosial dapat dipromosikan lewat berbagai elemen, termasuk bahasa di dalamnya. Satu contoh yang dapat dikemukakan adalah negosiasi peran (tarik-ulur *power*) dalam kehidupan sehari-hari, seperti dinamika dalam hubungan perawat dengan pasiennya, yang berubah dari waktu ke waktu serta tidak terlepas dari upaya penggunaan bahasa (lihat Candlin 2000).

Mengapa bahasa terkait erat dengan dengan proses sosial? Jawaban yang dapat dikemukakan adalah bahwa proses sosial dapat dideteksi lewat berbagai tindakan yang dilakukan oleh personel dari sebuah komunitas, sementara kegiatan berbahasa sendiri merupakan tindakan (*speech acts*). Dengan demikian, proses sosial pun (minimal) sebagian dilakukan lewat tindakan verbal. Sebuah perang yang lebih bersifat non-verbal pun mungkin kalau dilihat secara historis didahului oleh serangkaian tindak verbal. Fakta tentang adanya tindak tutur inilah yang menjadikan bahasa perlu dikaji dalam analisis sosial.

Dulu bahasa dianggap hanya sebagai alat untuk menyampaikan proposisi. Filsuf Austin (1962), lewat buku klasiknya yang berjudul *How to Do Things with Words*, memperkenalkan konsep baru: bahasa digunakan untuk melakukan berbagai aksi. Dalam hal ini, kegiatan manusia sehari-hari ada yang sama sekali tidak menggunakan bahasa (non-verbal), seperti tidur, makan, dan lari. Di lain pihak, ada kegiatan manusia yang sangat sulit (bahkan tidak mungkin) dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, seperti berjanji, bersumpah, atau menikah (lihat Austin 1962; Searle 1969; Grundy 1995). Selain itu, tindakan verbal dan non-verbal dapat digabungkan untuk memperkuat kesan yang ditimbulkan, seperti tindakan *mengancam* yang direalisasikan lewat kata-kata, plus mengacungkan kepala tangan. Jadi jelas bahwa bahasa merupakan bagian dari tindakan yang dilakukan manusia sehari-hari. Karena tindakan ini merupakan unsur penting dari proses sosial, maka analisis terhadap penggunaan bahasa akan sangat mendukung kajian sosial. Bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana analisis tersebut dapat dilakukan.

### **3 Pemaknaan kritis terhadap teks: sebuah alternatif analisis sosial**

Ketika tindak tutur sudah direalisasikan, maka terciptalah teks. Beraneka teks kita produksi maupun kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tujuan pun disampaikan lewat teks. Sebagai konsekuensi logis dari keanekaragaman ini, teks memiliki banyak dimensi, dan untuk mengeksplorasinya diperlukan pengetahuan yang cukup ikhwal pemaknaan teks tersebut, dari yang bersifat denotatif hingga yang bersifat sosial-ideologis.

Bahwa bahasa dianggap lebih dari sekedar kode 'netral' untuk menyampaikan makna denotatif bukanlah merupakan barang baru. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi mengkodekan pandangan terhadap lingkungan sekitar, atau ideologi (lihat Kress 1991). Teks dianggap bersifat ideologis karena merupakan benda sosial, yang tercipta lewat situasi sosial tertentu, sehingga mengandung ciri-ciri dari situasi tempat teks tersebut diciptakan (Kress 1991). Dengan demikian, seorang pencerna teks perlu memahami ideologi yang terkandung di dalam teks. Ini hanya dapat dilakukan apabila

dia memiliki sikap kritis terhadap fenomena-fenomena berbahasa berikut proses yang berlangsung di dalamnya.

Dalam proses komunikasi, yang disampaikan pada dasarnya adalah makna. Seperti terilustrasikan secara sederhana dalam Diagram 1, komunikasi verbal berlangsung ketika penutur menyampaikan pesan/maknanya dalam bentuk teks. Ketika teks sampai kepada penerima pesan, dia akan mencoba merekonstruksi makna yang ada dalam pikiran penutur lewat teks yang diterimanya. Dengan demikian, proses pemaknaan terhadap maksud penutur terjadi secara tidak langsung, seperti terepresentasikan oleh garis putus-putus.

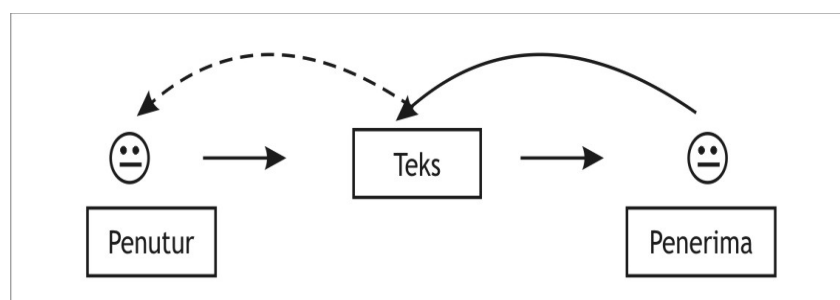


Diagram 1: Alur komunikasi verbal

Selanjutnya muncul pertanyaan (i) seberapa lengkap penutur dapat menuangkan makna di kepalanya ke dalam teks, dan (ii) seberapa banyak makna yang terkandung dalam teks dapat direkonstruksi oleh si penerima pesan. Dalam konteks ini distorsi dapat terjadi, baik dalam proses penuangan makna maupun rekonstruksi makna. Distorsi ini dapat menjadi pangkal dari berbagai ketidaknyamanan yang tercipta setelahnya.

Apabila si penerima pesan mengalami kesulitan untuk merekonstruksi secara penuh isi kepala si penutur, ini dapat disebabkan oleh minimal dua hal. Pertama, karena keterbatasan sifat teks, mungkin tidak semua maksud penutur dapat tertuang dalam teks. Ketika berbicara dalam bahasa Sunda, misalnya, penutur akan sulit menyiratkan nilai-nilai egalitarianisme karena sifat bahasa Sunda yang hirarkis dengan *undak-usuk basanya*. Dalam bahasa Indonesia sekalipun, yang jauh lebih demokratis dibanding bahasa Sunda, penyiratan nilai egalitarianisme akan terhambat di antaranya oleh tidak adanya istilah rujukan untuk orang kedua (*terms of address*) yang netral secara sosial. *Kamu, Saudara, Anda, Bapak/Ibu*, dan yang sejenis tidak dapat digunakan untuk sembarang orang dalam sembarang situasi. Bandingkan dengan kata ganti bahasa Inggris *you*, yang pada dasarnya dapat digunakan untuk siapapun dalam situasi apapun.

Kedua, dengan mengandalkan sifat-sifat teks, penutur dapat dengan sengaja menyembunyikan atau mengaburkan hal-hal tertentu. Nominalisasi, misalnya, dapat digunakan untuk membuat sebuah tindakan tampak kabur. Ketika membaca [a], misalnya, mungkin akan tergambar dalam pikiran seperti apa proses kejadiannya: ada yang menembakkan senjata, (mungkin) ada yang terkapar bersimbah darah, ada yang tiarap, ada yang lari pontang-panting, dst. Ketika kejadian tersebut dilaporkan dengan gaya [b], maka ada aspek dari kejadian tersebut yang tersamar, seperti pelakunya dan kengerian yang timbul dari proses *dar-der-dornya*. Kata *penembakan* dalam [b] merupakan nominalisasi 'pembendaan' dari tindakan *menembaki penduduk*. Bukan tidak mungkin penutur [b] mempunyai maksud-maksud tertentu ketika

menyampaikan berita tersebut dengan cara seperti itu, dan hal yang sama juga berlaku bagi penutur [a].

[a] Mereka menembaki penduduk tadi malam.

[b] Penembakan terhadap penduduk berlangsung tadi malam.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dibedakan antara ‘pemaknaan kritis’ dengan pemaknaan yang ‘non-kritis’. Rekonstruksi non-kritis terhadap makna lebih bersifat deskriptif. Lewat pemaknaan seperti ini, kalimat [a] dan [b] di atas tidak terlalu berbeda, karena pada dasarnya kedua kalimat tersebut mendeskripsikan kejadian yang sama. Baru lewat pemahaman kritislah dapat dikenali adanya perbedaan nuansa yang dikandung oleh kedua kalimat tersebut.

Penafsir yang kritis biasanya menyadari bahwa penutur (istilah ini mewakili pembicara maupun penulis) tentu ingin menyampaikan berbagai maksud yang dilandasi oleh berbagai kepentingan. Ada yang sekedar berniat deskriptif-denotatif, memaparkan sesuatu sejelas-jelasnya tanpa udang dibalik batu; ada yang secara ‘tidak sadar’ menyiratkan ideologi tertentu dalam teks; tapi ada pula yang dengan sengaja menyembunyikan agenda tertentu dalam teks yang diproduksinya.

Pemaknaan kritis selanjutnya akan menuntun penafsir ke arah kesadaran kritis akan praktek-praktek berbahasa, yang dikenal sebagai *critical language awareness* (lihat Fairclough 1992a). Kesadaran kritis pada dasarnya merupakan proses lanjutan dari kesadaran deskriptif. Kesadaran kritis tidak sekedar mempertanyakan *bagaimana* sebuah fenomena bahasa berlaku tapi juga akan menelusuri *mengapa* fenomena tersebut terjadi dan bahkan kalau mungkin akan sampai pada pertanyaan *lalu bagaimana* menyikapi fenomena tersebut.

Sebagai ilustrasi, seorang siswa SMA penutur asli bahasa Indonesia mengetahui bahwa untuk merujuk pada mitra tutur dia dapat menggunakan beragam kata ganti seperti *Anda*, *engkau*, dan *kamu*, atau gelar ‘kekerabatan’ seperti *Bapak* dan *Ibu*. Selanjutnya dia harus memilih istilah yang tepat untuk situasi tertentu. Sampai titik ini, pengetahuan yang dimiliki si penutur masih bersifat deskriptif. Kesadaran kritis si penutur tumbuh manakala dia mulai mempertanyakan mengapa kalau berbicara dengan gurunya dia merasa dituntut untuk menggunakan *Bapa/Ibu*, sementara kalau berbicara dengan temannya dia cukup menggunakan *kamu*. Jawaban dari pertanyaan ini biasanya bersifat sosiokultural, dan harus diterangkan lewat variabel-variabel sosial seperti *power* ‘kekuasaan’ dan *distance* ‘jarak sosial’, yang selanjutnya akan sampai pada eksplorasi ideologi yang melandasinya (lihat Brown & Gilman 1960; Lukmana 2001, 2002).

Jika si penutur sampai pada tataran kritis yang lebih tinggi, dia mungkin akan mempertanyakan apakah dia akan menerima saja kenyataan itu sebagai sesuatu yang wajar (ideologis) atau merasa perlu mengubah tatanan berbahasa tersebut dalam konteks *power struggle* ‘tarik-ulur kekuasaan’ (Fairclough 1992a). Apapun pilihannya, dia telah melalui sebuah proses pengkritisan. Seandainya dia memilih untuk menerima fenomena berbahasa tersebut, maka pilihannya dapat dikategorikan sebagai pilihan yang disadari.

Dalam merekonstruksi makna yang disampaikan secara verbal, penerima pesan perlu mengakrabi sifat dari teks yang akan dicernanya. Untuk itulah *grammar* dari bahasa yang terkait perlu dikuasai. Teori tata bahasa yang dapat digunakan untuk merekonstruksi makna secara penuh dan kritis diulas secara singkat pada bagian berikut.

#### 4 Tatabahasa dan pemaknaan kritis

Secara tradisional tatabahasa dikenal sebagai kajian tentang struktur dari sebuah bahasa, yang dibangun oleh unsur bunyi, kata, kalimat, dan makna denotatif. Dalam konteks inilah muncul beragam terminologi seperti *nomina*, *verba*, *frasa*, *subjek*, dan *predikator*. Namun kategori-kategori seperti ini sulit diandalkan untuk dapat merekonstruksi makna sebuah teks. Misalnya, urutan kategori struktural dalam [c] hampir tidak bermakna apa-apa.

[c] Frasa Nomina – Verba – Frasa Nomina

[d] Aktor – Proses Material – Sasaran

Belakangan muncul teori *Systemic-Functional Grammar* (SFG), yang dimotori oleh Halliday (1994). SFG adalah teori tatabahasa yang berbasis makna. Apabila kalimat yang dianalisis secara formal/tradisional seperti tercermin dalam [c] dianalisis juga dengan SFG, hasilnya kurang lebih tercermin dalam [d]. Kategori-kategori yang digunakan dalam SFG tersebut tampak lebih bermakna: (seorang) aktor terlibat dalam (sebuah) proses material untuk mencapai (suatu) sasaran. Kalimat yang mendasari analisis dalam [c] dan [d] adalah [e], di bawah ini.

[e] Kami membeli kentang kualitas terbaik.

(diadaptasi dari Gerot & Wignell 1994:12)

SFG bergerak jauh dengan mengaitkan berbagai fenomena yang dalam tatabahasa tradisional/formal dianggap hanya bernuansa struktural dengan berbagai dimensi makna yang terkandung dalam teks, yaitu makna *ideational*, interpersonal, dan tekstual. Makna *ideational* merujuk pada apa yang terjadi (*field*) dan dianalisis lewat transitivitas yang mencakup proses, partisipan, dan keadaan. Makna interpersonal mengacu pada hubungan sosial (*tenor*) di antara para pelaku komunikasi, yang dapat teridentifikasi lewat realisasi *mood*. Makna tekstual menyangkut *mode* dari sebuah *discourse*, seperti apakah sebuah *discourse* direalisasikan secara lisan atau tulisan.

SFG dapat dikatakan sebagai awal dari munculnya satu aliran dalam analisis wacana yang dikenal sebagai *critical discourse analysis* (CDA). Dilihat dari sisi kesejarahannya, CDA merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari *discourse analysis* ‘analisis wacana’. Kajian *discourse analysis* begitu luas baik dari segi cakupannya, metodologinya, maupun pemaknaannya (lihat Pennycook 1994; Schiffrin 1994). CDA mempunyai ciri yang berbeda dari analisis *discourse* yang bersifat ‘non-kritis’. Analisis *discourse* yang non-kritis cenderung hanya mendeskripsikan struktur dari sebuah *discourse*, seperti aspek koherensi dan kohesivitasnya. Sementara itu CDA bertindak lebih jauh, di antaranya dengan menggali alasan-alasan mengapa sebuah *discourse* memiliki struktur tertentu, yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi *discourse*.

Di antara tokoh yang gencar mempromosikan CDA adalah Fairclough dan van Dijk. Fairclough (1992b) menggabungkan metoda analisis bahasa yang dikembangkan dalam linguistik dengan pemikiran sosial politik yang relevan dengan pengembangan teori sosial dari bahasa. Untuk merealisasikannya, Fairclough (1992b) mengajukan pendekatan tiga dimensi: suatu kemunculan *discourse* dipandang secara simultan sebagai sebuah teks, sebuah contoh praktek diskursif, dan sebuah contoh praktek sosial.

Studi kritis terhadap penggunaan bahasa menyoroti bagaimana konvensi dan praktek berbahasa berkait dengan hubungan kekuasaan dan proses ideologis yang sering tidak disadari oleh masyarakat (Fairclough 1992a). Selanjutnya Fairclough mengemukakan beberapa pokok pikiran tentang studi kritis terhadap bahasa ini (1992a:8-9). Pertama, *discourse* dibentuk dan dibentuk oleh masyarakat; kedua, *discourse* membantu membentuk (dan mengubah) pengetahuan beserta objek-objeknya, hubungan sosial, dan identitas sosial; ketiga, *discourse* dibentuk oleh hubungan kekuasaan, dan terkait dengan ideologi; keempat, pembentukan *discourse* menandai adanya tarik-ulur kekuasaan (*power struggles*); dan terakhir CDA mengkaji bagaimana masyarakat dan *discourse* saling membentuk satu sama lain.

Keterkaitan antara *discourse* dengan kekuasaan juga ditekankan oleh van Dijk, yang menempatkan CDA sebagai sarana untuk mengkaji peran *discourse* dalam (re)produksi dan resistensi terhadap dominasi. Dominasi dimaknai sebagai penerapan kekuasaan sosial oleh para elit, institusi, atau kelompok, yang berujung pada ketidaksetaraan sosial (*social inequality*), seperti dalam ranah politik, kelas, etnik, dan jenis kelamin (van Dijk 1993a). Para analis CDA mengkaji aspek tekstual-verbal dan sosial apa saja yang berperan dalam proses di atas.

Menurut van Dijk (1993a), CDA pada umumnya berfokus pada tindakan kaum elit beserta strategi-strategi diskursifnya untuk memelihara ketidaksetaraan. Selanjutnya CDA harus menyoroti dimensi *discourse* dari penyalahgunaan kekuasaan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang diakibatkannya, dengan harapan akan terjadi perubahan lewat pemahaman yang kritis. Oleh karena itu, salah satu ciri CDA adalah solidaritas dengan kaum yang terdominasi, dengan mengkritisi elit kekuasaan yang menciptakan, mempertahankan, melegitimasi, atau mengabaikan ketidakadilan dan ketidaksetaraan (van Dijk 1993a).

Kekuasaan sosial didasarkan pada hak akses terhadap sumber-sumber yang bernilai sosial seperti kekayaan, penghasilan, posisi/jabatan, dan status sosial, termasuk akses terhadap berbagai praktek diskursif, yang merupakan sumber kekuasaan yang penting (van Dijk 1993a, 1996). Yang memiliki akses untuk mengikuti debat DPR, misalnya, hanyalah anggota DPR. Begitu pula yang mempunyai akses untuk mengikuti rapat kelulusan siswa adalah kepala sekolah dan guru. Dalam hal ini, ketidakberdayaan dapat juga diukur lewat kurangnya atau tidak adanya akses terhadap *discourse* terkait (van Dijk 1993a).

Selanjutnya, kekuasaan juga berdimensi kognitif. Selain mengontrol aksi, kekuasaan juga mengontrol kognisi. Kelompok yang dominan bukan hanya dapat membatasi kebebasan bertindak dari kelompok yang terdominasi, tapi juga mempengaruhi jalan pikirannya. Perlu dicatat bahwa kekuasaan yang lebih modern dan cenderung efektif kebanyakan bersifat kognitif, yang dicapai di antaranya lewat persuasi dan manipulasi. Pada tahap inilah terletak peran dari CDA, karena mengatur/mempengaruhi pikiran orang lain pada esensinya merupakan fungsi dari teks dan *talk* (van Dijk 1993a:254).

Perlu juga dicatat bahwa kekuasaan atau dominasi dapat berbentuk halus sehingga tampak alami, sampai saatnya konsep tersebut dipertanyakan (van Dijk 1993a). Ketika pikiran si terdominasi dapat dipengaruhi sehingga mereka dapat menerima dominasi dan bertindak untuk kepentingan yang mendominasi tanpa merasa terpaksa, maka digunakan istilah *hegemony* (van Dijk 1993a:255). Memang (penyalahgunaan) kekuasaan sering tampak seperti 'diciptakan bersama', misalnya ketika kelompok yang didominasi dapat diyakinkan bahwa dominasi yang berlangsung itu bersifat 'alami' atau memiliki legitimasi. Pada ujungnya, dapat terbentuk opini publik atau kognisi sosial, yang diakui bersama oleh anggota

kelompok (van Dijk 1993a). Inti dari CDA adalah deskripsi, explanasi, dan kritik terhadap bagaimana *discourse* yang dominan mempengaruhi pemikiran sosial (van Dijk 1993a).

## 5 Ilustrasi: hirarki, keberpihakan, identitas

### 5.1 Hirarki dalam praktek berbahasa

*Power* (kekuasaan) tentu ada di mana-mana. Sementara *power* mengindikasikan ketidaksetaraan, solidaritas menonjolkan kesamaan. Dalam hubungan *power-solidarity*, hirarki dapat ditempatkan pada sebuah titik ekstrim dalam sebuah bentangan (*continuum*), sementara di sisi ekstrim lainnya terletak solidaritas. Hubungan *power* dua orang yang sedang berinteraksi mungkin terletak di ekstrim kiri, ekstrim kanan, atau di antara keduanya.

Contoh bagaimana bahasa dapat dipergunakan untuk mendeteksi hirarki dapat dilihat pada studi Lukmana dkk. (2006). Penelitian ini mengkaji dinamika sosial yang berlangsung dalam interaksi guru-murid, melalui analisis kritis terhadap teks yang diambil lewat perekaman audio. Realisasi verbal dari interaksi guru-murid di dalam kelas kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka CDA, yang berpedoman pada prinsip-prinsip SFG. Karena dinamika sosial terkait erat dengan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi, studi ini berfokus pada makna interpersonal yang terkandung dalam teks dengan mengeksplorasi realisasi *speech function* sebagai bagian dari aspek *mood*.

Ditemukan bahwa interaksi di dalam kelas sangat didominasi oleh guru, dan ini dapat dilihat dari realisasi *speech function* di dalam kelas. Data menunjukkan bahwa guru membuat lebih banyak *speech function* dibanding murid. Satu penyebabnya adalah bahwa guru sering memproduksi lebih dari satu *speech function* ketika mendapat giliran berbicara. Sebaliknya, murid cenderung hanya membuat satu *speech function* ketika mendapat giliran. Patut juga dicatat bahwa *speech function* yang diucapkan guru cenderung lebih panjang dibanding yang diucapkan murid, karena guru banyak membuat *speech function* yang berisi banyak kata. Sementara itu, murid cenderung membuat *speech function* yang berupa respon pendek, sering berisi satu kata saja, bahkan kadang-kadang hanya berupa suku kata (melanjutkan ucapan guru).

Selanjutnya ditemukan bahwa jenis *speech function* yang diproduksi oleh guru dan murid sangat berbeda. *Speech function* guru mayoritas berupa inisiasi, sedang sebagian kecil berupa respon. Di lain pihak, murid lebih banyak memberikan respon dibanding melakukan inisiasi. Respon siswa ini kebanyakan berupa respon yang positif atau mendukung inisiasi guru. Meskipun minim dalam kuantitas dan kualitas, geliat sosial (*power struggle*) dapat terdeteksi dalam komunikasi verbal siswa, terlihat dari sedikit tindakan mereka mengkontradiksi pernyataan guru (memberi respon negatif).

Dominasi guru di atas, di mana guru jauh lebih banyak berbicara dan berinisiasi dibanding murid, menunjukkan pola hubungan yang cenderung searah. Tampaknya ini merupakan cerminan ideologi bahwa guru adalah pemegang kekuasaan manajerial di kelas, juga pemegang otoritas keilmuan. Selain itu, guru juga tampaknya belum 'rela' melepaskan dominasinya di dalam kelas. Hirarki guru-murid seperti ini tentu dapat dideteksi lewat berbagai cara, dan analisis terhadap *speech*



*function* (bagian dari SFG) telah terbukti merupakan salah satu cara yang efektif dan cukup terperinci.

## 5.2 Keberpihakan dalam praktek berbahasa

Keberpihakan juga dapat dideteksi lewat analisis penggunaan bahasa, seperti terilustrasikan dalam eksplorasi terhadap sejumlah pemberitaan dalam koran *Jakarta Post* tentang peristiwa invasi ke Irak dan pengeboman di Bali (Kodrat 2004). Sebagai acuan linguistiknya (lihat SFG), Kodrat berfokus pada nominalisasi, pasivisasi, transitivitas, dan tematisasi. Tulisan ini hanya menyoroti unsur nominalisasi dan tematisasi.

Nominalisasi dapat dibandingkan dengan transitivitas. Dalam hal ini perlu dilihat apakah sebuah kejadian direpresentasikan lewat proses/transitivitas, sehingga tampak jelas/lugas, atau lewat nominalisasi, dengan konsekuensi adanya unsur makna yang terkubur atau tersamar (lihat contoh [a] dan [b] di atas). Ditemukan bahwa dalam pemberitaan tentang invasi ke Irak terdapat 659 buah nominalisasi (40,5%), jauh lebih banyak dibanding 365 nominalisasi (21,5%) pada peristiwa pemboman Bali. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kejadian-kejadian dalam invasi ke Irak jauh lebih banyak disamarkan atau diperlembut dibanding kejadian-kejadian di Bali. Tafsiran selanjutnya, karena aktor invasi ke Irak adalah Barat, maka *Jakarta Post* ingin menyamarkan tindakan kekerasan oleh Barat di Irak; sementara itu kekerasan di Bali (aktornya diasumsikan non-Barat) tidak banyak disamarkan. Dengan demikian, koran *Jakarta Post* tampak memihak ke Barat.

Pemihakan ke Barat oleh *Jakarta Post* ini didukung lebih lanjut oleh data tematisasi, seperti tercermin pada Tabel 1. Pengkajian terhadap *topical theme* dari setiap klausa menunjukkan bahwa kejadian bom Bali paling banyak diasosiasikan dengan tema terorisme, yang sama sekali tidak muncul dalam pemberitaan tentang invasi Irak. Sebagai gantinya, tindak kekerasan di Irak paling banyak diasosiasikan dengan istilah *war* 'perang'. Meski juga merupakan tindak kekerasan, perang berkonotasi positif, sebagai kegiatan yang terjustifikasi dan terhormat. Pelaku terorisme adalah teroris, sedangkan pelaku perang adalah *hero* 'pahlawan'. Dengan demikian, tindakan Barat dianggap sebagai tindakan yang heroik, sementara pihak non-Barat digambarkan sebagai pembuat teror. Sekali lagi, ini mendukung tafsiran tentang keberpihakan *Jakarta Post* ke Barat.

<i>Topical theme</i>	<i>The Bali bombing</i>	%	<i>The Iraqi invasion</i>	%
<i>Terrorism</i>	645	44	-	-
<i>War</i>	-	-	686	49
<i>US official</i>	37	2.5	267	19
<i>Muslims</i>	420	28	126	9
<i>Philippines</i>	26	1.7	-	-
<i>Australian administration</i>	35	2.3	-	-
<i>The antiterrorism bill</i>	35	2.3	-	-
<i>Megawati administration</i>	279	18	-	-
<i>Saddam Hussein administration</i>	-		321	22

Tabel 1: Tematisasi dalam pemboman Bali dan invasi Irak (Kodrat 2004:52)

Contoh di atas, sebagaimana halnya contoh pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa analisis kritis terhadap kegiatan berbahasa dapat dijadikan salah satu strategi yang efektif untuk mengeksplorasi berbagai hal yang terkait dengan proses sosial.

### 5.3 Identitas dalam praktek berbahasa

Sebuah contoh kajian terkait bagaimana identitas dari sebuah entitas teridentifikasi lewat wacana dilakukan oleh Lukmana (2007). Kajian ini mengungkap identitas wacana dua buah surat kabar (Kompas dan Republika) lewat kajian terhadap kolom tajuk rencana terkait isu nuklir Iran. Data dianalisis dengan menggunakan kerangka CDA, yang berpedoman pada prinsip-prinsip SFG, dengan fokus pada aspek modalitas.

Fairclough (2003) mengatakan bahwa aspek verbal dari identitas dapat dideteksi lewat sistem modalitas dan evaluasi. Keduanya terkait dengan bagaimana penutur mengkomitmenkan diri terhadap apa yang dianggap benar dan perlu (modalitas) dan terhadap apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, apa yang baik dan apa yang buruk (evaluasi). Terkait komitmen ini, “... *what people commit themselves to in texts is an important part of how they identify themselves, the texturing of identities*” (Fairclough 2003:164). Untuk keperluan delimitasi, Lukmana (2007) hanya meyoroti aspek modalitas.

Modalitas terkait dengan komitmen seseorang ketika merealisasikan sebuah *speech function*, yang berisi pertukaran informasi (yang utama: *statement & question*) dan pertukaran aktivitas atau jasa (yang utama: *demand & offer*) dalam sebuah aktivitas sosial (lihat Fairclough 2003; Halliday 1994; Lukmana dkk. 2006). Komitmen ini mengandung dua unsur, yaitu apa yang menjadi komitmennya dan bagaimana komitmen tersebut direalisasikan.

Ditemukan bahwa ketika bertutur mengenai masalah yang sama (isu nuklir Iran), Kompas dan Republika merealisasikan komitmen terhadap apa yang dibahasnya dengan cara yang berbeda. Kompas lebih banyak menggunakan modalitas dibanding Republika. Dengan kata lain, harian Republika lebih banyak menyajikan apa yang disampaikan lewat polaritas dibanding Kompas. Penggunaan polaritas ini dapat diasosiasikan dengan kelugasan, sementara modalitas dengan pengurangan klaim bahkan pelembutan atas sebuah informasi.

Tampaknya, dengan mempertimbangkan sensitivitas dari isu yang diangkatnya ini, Kompas ingin menyajikan permasalahan ini secara lembut, lewat penggunaan banyak modalitas, selain penggunaan judul yang sangat normatif. Penyajian yang lembut ini tentu saja berpotensi meredam gejolak dan menguntungkan pihak yang kontra Iran (Barat). Tampaknya ideologi yang mendasari penyajian tajuk rencana Kompas ini adalah pertimbangan anti kontroversi. Karena sikapnya ini, Kompas dapat saja dianggap pro Barat.

Sebaliknya, Republika mengusung isu yang sama dengan hampir tanpa filter. Ini bisa dideteksi di antaranya dari minimnya modalitas yang dipergunakan, didukung oleh judul yang lugas, menampilkan Barat sebagai pihak pengeroyok dan Iran sebagai pihak yang teraniaya namun kuat. Cara penyajian isu nuklir Iran oleh Republika di atas mengindikasikan keberpihakan koran ini kepada Iran. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ideologi yang mendasari penyajian tajuk rencana Republika adalah keberpihakan kepada yang tertindas (dalam hal ini Iran). Bahkan dapat ditafsirkan bahwa Republika adalah koran yang tidak pro Barat, minimal dalam kasus ini.

Contoh ini sekali lagi menegaskan bahwa analisis kritis terhadap kegiatan berbahasa (CDA) merupakan salah satu strategi yang dapat dipergunakan untuk menggali berbagai hal yang terkait dengan proses sosial. Cara ini tentu dapat diharmonisasikan dengan cara lain, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang sebuah proses sosial.

## **6 Implikasi praktis-pedagogis**

Kita mungkin tidak terlalu menyadari seberapa penting peran bahasa dalam perubahan sosial yang berlangsung di sekitar kita. Menurut Fairclough (1992a), pendidikan *critical language awareness* sekarang ini menjadi penting karena tiga hal. Pertama, ada perubahan dalam cara menerapkan kekuasaan dan kontrol. Dalam masyarakat modern sekarang ini, kekuasaan semakin banyak diterapkan lewat cara-cara verbal dibanding otot (lihat juga van Dijk 1993a, 1993b). Kedua, salah satu bagian yang berubah secara signifikan dalam masyarakat sekarang adalah praktek berbahasa, seperti pola hubungan verbal antara profesional dengan klien. Sementara dulu klien harus menyesuaikan diri dengan para profesional, sekarang ini para profesional cenderung lebih mengakomodasi faktor klien. Dalam dunia pendidikan, misalnya, perkembangan terbaru lebih mementingkan keaktifan siswa daripada dominasi guru di dalam kelas. Perubahan seperti ini telah mendorong munculnya teknologisasi wacana, di antaranya untuk mengantisipasi tuntutan dunia kerja (Fairclough 1996). Terakhir, bahasa itu sendiri dijadikan target untuk diubah, karena perubahan dalam praktek berbahasa dianggap signifikan dalam menciptakan perubahan sosial-budaya yang lebih luas. Akhir-akhir ini, misalnya, banyak ditemukan pada media massa Indonesia pola penyebutan orang tanpa embel-embel gelar apapun, baik gelar akademik, profesional, kekerabatan, apalagi kebangsawanan. Pers Indonesia tampaknya memiliki agenda tertentu dengan kebiasaan barunya tersebut.

Perubahan dalam praktek berbahasa didorong di antaranya oleh perubahan dalam dunia usaha, yang ditandai dengan semakin membengkaknya sektor jasa melebihi sektor industri (Fairclough 1996). Akibatnya, lebih banyak orang yang harus berkomunikasi dengan publik atau klien. Bahkan dalam bidang industri sekalipun, yang bernuansa mekanik-robotik, para karyawan sekarang ini lebih dituntut untuk dapat bekerja dalam tim, yang menyiratkan semakin dibutuhkannya ketrampilan komunikasi yang lebih kompleks.

Dalam konteks yang lebih umum, kesadaran kritis ini ditenggarai oleh Fairclough (1992a) sebagai prasyarat untuk mencapai kewarganegaraan yang demokratis-efektif, karena turut membangkitkan kesadaran seorang warga negara akan posisi sosialnya. Kesadaran ini selanjutnya akan mendorongnya untuk lebih memahami hak dan kewajibannya. Yang penting diperhatikan adalah bahwa seseorang harus memahami dengan kritis apapun posisi sosial yang didudukinya. Pemahaman seperti ini akan turut mencegah kepatuhan buta. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan seorang warga negara dalam posisi sosialnya perlu disadari penuh oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila mungkin, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dapat diminimalisasi.

Tampaknya CLA perlu dimasukkan dalam program pendidikan budaya dan/atau kewarganegaraan, karena CLA menyuguhkan contoh pernik-pernik kehidupan bermasyarakat yang nyata. Pendidikan seperti ini perlu ditanamkan sejak usia dini, untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kesadaran kritis akan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab sosial.

## 7 Penutup

Telah dipaparkan bahwa analisis terhadap praktek berbahasa sangat potensial untuk dijadikan salah satu strategi analisis terhadap proses sosial. Analisis bahasa menjadi penting karena bahasa dapat dipengaruhi tapi juga mempengaruhi struktur dan dinamika sosial. Lebih dari itu, analisis kritis terhadap praktek-praktek penggunaan bahasa dapat dijadikan alat untuk membangkitkan kesadaran sosial masyarakat.

Peran bahasa semakin penting belakangan ini karena telah terjadi perubahan orientasi bisnis, dari industri ke jasa. Pergantian orientasi juga terjadi pada pola hubungan antara profesional dengan masyarakat umum. Para profesional cenderung semakin mengakomodasi faktor klien, dan ini akan mengubah praktek-praktek berbahasa terkait. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menerapkan kekuasaan lewat cara-cara persuasif yang kemungkinan besar melibatkan faktor bahasa.

Mempertimbangkan faktor-faktor di atas, tampaknya rekonstruksi kritis terhadap makna perlu dimasukkan dalam program pendidikan yang terkait dengan aspek bahasa dan sosial-budaya. Selain membangkitkan kesadaran kritis terhadap praktek-praktek berbahasa, CDA juga menyuguhkan contoh kehidupan bermasyarakat yang nyata. Terakhir, CDA perlu dipromosikan sebagai pisau analisis untuk membedah berbagai fenomena kemasyarakatan, karena struktur dan dinamika sosial banyak terekam dalam sekaligus dipengaruhi oleh praktek-praktek berbahasa. Lewat CDA, misalnya, dapat diungkap berbagai fenomena sosial seperti keberpihakan, hirarki, dan identitas.

## Pustaka rujukan

- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Brown, Roger dan Albert Gilman. 1960. The pronouns of power and solidarity. Dalam Thomas A. Sebeok (editor) *Style in Language*. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology, hal. 253-276.
- Candlin, Sally. 2000. New dynamics in the nurse-patient relationship? Dalam Srikant Sarangi dan Malcolm Coulthard (editor) *Discourse and Social Life*. Harlow, England: Pearson Education, hal. 230-245
- Fairclough, Norman. 1992a. *Critical Language Awareness*. London: Longman
- Fairclough, Norman. 1992b. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: the critical study of language*. London: Longman
- Fairclough, Norman. 1996. Technologisation of discourse. Dalam Carmen R. Caldas-Coulthard dan Malcolm Coulthard (editor) *Texts and Practices: readings in critical discourse analysis*. London: Routledge, hal. 71-83.
- Fairclough, Norman. 2003. *Analysing Discourse: textual analysis for social research*. London: Routledge.
- Gerot, Linda dan Peter Wignell. 1994. *Making Sense of Functional Grammar*. Cammeray, NSW: Antipodean Educational Enterprises.
- Grundy, Peter. 1995. *Doing Pragmatics*. London: Arnold.

- Halliday, M.A.K. 1994. *An Introduction to Functional Grammar*, edisi ke-2. London: Arnold.
- Kodrat, Denny. 2004. *The Representation of the West in the Jakarta Post during the Bali Bombing and Iraqi Invasion: a case in critical discourse analysis*. Skripsi pada Jurusan Bahasa Inggris, FPBS, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kress, Gunther. 1991. Critical discourse analysis. Dalam Michael Clyne (editor) *Linguistics in Australia: trends in research*. Canberra: Academy of Social Sciences in Australia, hal. 163-179.
- Lukmana, Iwa. 2001. Another key factor in reference to a third person: the presence of the third person. *Melbourne Papers in Linguistics and Applied Linguistics*, Vol. 1/2, hal. 39-51.
- Lukmana, Iwa. 2002. *Reference to a Third Person in Sundanese*. Tesis doktoral (tidak dipublikasikan) pada Jurusan Linguistik, Monash University, Australia.
- Lukmana, Iwa. 2005. Sundanese speech levels. Dalam *Seri Sundalana 4: Islam dalam Kesenian Sunda*. Bandung: Pusat Studi Sunda, hal 65-83.
- Lukmana, Iwa. 2007. *Modalitas dan Identitas Media: sebuah tinjauan wacana kritis*. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Linguistik Nasional, diselenggarakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia di Solo, September 2007.
- Lukmana, Iwa. 2008. Undak-Usuk Bahasa Sunda dan Ajip Rosidi. Dalam A. Chaedar Alwasilah, Hawe Setiawan, dan Rachmat Taufiq Hidayat (editor) *Jejak Langkah Urang Sunda: 70 tahun Ajip Rosidi*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama, hal. 119-130.
- Lukmana, Iwa; E. Aminudin Aziz; Dede Kosasih. 2006. Makna interpersonal dalam interaksi guru-murid: sebuah kajian wacana kritis. *Linguistik Indonesia*, tahun 24/1, Februari 2006, 11-22.
- Pennycook, Alastair. 1994. Incommensurable discourses? *Applied Linguistics*, Vol. 15/2, hal. 115-138.
- Rosidi, Ajip. 2004. Undak usuk basa teu demokratis. *Cupumanik*, no. 6/2004, Januari 2004, hal.30-32.
- Rosidi, Ajip. 2005. Kecap-kecap lemes anyar. *Cupumanik*, no. 18/2005, Januari 2005, hal.18-19.
- Rosidi, Ajip. 2006. Sunda sadaya-daya. *Cupumanik*, no. 30/2006, Januari 2006, hal.18-20.
- Schiffrin, Deborah. 1994. *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Searle, J.R. 1969. *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Dijk, Teun A. 1993a. Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, Vol. 4/2, hal. 249-283.
- van Dijk, Teun A. 1993b. Editor's foreword to critical discourse analysis. *Discourse & Society*, Vol. 4/2, hal. 131-132.
- van Dijk, Teun A. 1996. Discourse, power, and access. Dalam Carmen R. Caldas-Coulthard dan Malcolm Coulthard (editor) *Texts and Practices: readings in critical discourse analysis*. London: Routledge, hal. 84-104.

